



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONISON PETRUS
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 71076

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	725.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI	Rp.	725.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.850.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	39.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	795.850.000
III. HUTANG	Rp.	553.100.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	242.750.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **HERI PURWANTO**
- Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
- NHK : **250458**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 618.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/100 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/160 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 391.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.400.000

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000
- LAINNYA, POLYGON HEIST 3.0 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 206.687.410

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 836.787.410

III. HUTANG Rp. 3.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 833.787.410

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : FITRA ADITYAWARMAN
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
- NHK : 821250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 665.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/54 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 370 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- Tanah Seluas 100 m2 di KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.000.000

- MOBIL, HONDA FREED MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
- MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 827.500.000

III. HUTANG Rp. 537.223.234

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 290.276.766

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.